

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN HIV (*HUMAN IMMUNODEFICIENSII VIRUS*) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD H. ABDUL AZIZ
MARABAHAN KALIMANTAN SELATAN**

Penelitian untuk Tesis S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh
dr. Normayni Maya Sari
NIM. 23C20075

kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN HIV (*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*)

DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

KALIMANTAN SELATAN

TESIS

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan

Diajukan oleh :

dr. Normayni Maya Sari

NIM. 23C20075

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pasien HIV dalam pelayanan kesehatan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, Kalimantan Selatan. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Stigma dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) masih menjadi tantangan besar, termasuk yang berasal dari petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pasien HIV, (2) mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien HIV, dan (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien HIV dalam pelayanan kesehatan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dengan spesifikasi deskriptif analitis. Lokasi penelitian di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Jenis data meliputi data primer (wawancara dengan 10 tenaga kesehatan dan 15 pasien HIV) dan data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan perlindungan hukum bagi pasien HIV telah memiliki landasan hukum yang cukup, baik di tingkat nasional (UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 17 Tahun 2023, Permenkes No. 23 Tahun 2022) maupun daerah (Pergub Kalsel No. 71 Tahun 2016), serta kebijakan internal rumah sakit berupa SK Direktur No. 17 Tahun 2022 tentang Tim PDP dan SOP alur pelayanan pasien HIV/AIDS; (2) Pelaksanaan perlindungan hukum menunjukkan hasil yang paradoks: aspek teknis seperti *informed consent* (100%), kerahasiaan medis (100%), dan non-diskriminasi (100%) berjalan sangat baik, namun 73,3% pasien tidak mendapatkan informasi tentang hak-hak legal mereka dan 66,7% memiliki kekhawatiran status HIV-nya terbuka; (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum meliputi stigma dan diskriminasi sosial, keterbatasan sumber daya manusia (pelatihan belum merata), keterbatasan sarana dan prasarana (APD lengkap belum tersedia, tidak ada ruang konsultasi privat), serta faktor regulasi dan kebijakan internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RSUD H. Abdul Aziz Marabahan telah berkomitmen memberikan pelayanan inklusif, namun perlindungan hukum substantif bagi pasien HIV masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pemberdayaan pasien melalui informasi hak-hak legal, penyediaan infrastruktur pendukung privasi, serta pelatihan berkelanjutan bagi seluruh tenaga kesehatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien HIV, Pelayanan Kesehatan, RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, Non-Diskriminasi.

ABSTRAC

This study discusses legal protection for HIV patients in healthcare services at H. Abdul Aziz Marabahan Regional General Hospital, South Kalimantan. HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a virus that attacks the human immune system. Stigma and discrimination against People Living with HIV/AIDS (PLWHA) remain major challenges, including those originating from healthcare workers. This study aims to: (1) examine the regulatory framework of legal protection for HIV patients, (2) examine the implementation of legal protection for HIV patients, and (3) identify factors influencing the implementation of legal protection for HIV patients in healthcare services at H. Abdul Aziz Marabahan Regional General Hospital. The research method used is juridical-sociological (socio-legal approach) with descriptive-analytical specifications. The research location was H. Abdul Aziz Marabahan Regional General Hospital. Data types include primary data (interviews with 10 healthcare workers and 15 HIV patients) and secondary data (literature study). Data collection techniques included semi-structured interviews and document study. Data analysis was conducted qualitatively. The results showed that: (1) The regulatory framework for legal protection of HIV patients has an adequate legal basis, both at the national level (Law No. 39 of 1999, Law No. 44 of 2009, Law No. 17 of 2023, Minister of Health Regulation No. 23 of 2022) and regional level (South Kalimantan Governor Regulation No. 71 of 2016), as well as internal hospital policies in the form of Director's Decree No. 17 of 2022 concerning the PDP Team and SOP for HIV/AIDS patient service flow; (2) The implementation of legal protection showed paradoxical results: technical aspects such as informed consent (100%), medical confidentiality (100%), and non-discrimination (100%) were implemented very well, however 73.3% of patients did not receive information about their legal rights and 66.7% had concerns about their HIV status being disclosed; (3) Factors influencing the implementation of legal protection include social stigma and discrimination, limited human resources (uneven training distribution), limited facilities and infrastructure (complete personal protective equipment not yet available, no private consultation room), as well as regulatory and internal policy factors. This study concludes that H. Abdul Aziz Marabahan Regional General Hospital has committed to providing inclusive services, however substantive legal protection for HIV patients still needs to be improved, particularly in the aspects of patient empowerment through legal rights information, provision of privacy-supporting infrastructure, and continuous training for all healthcare workers.

Keywords: Legal Protection, HIV Patients, Healthcare Services, H. Abdul Aziz Marabahan Regional General Hospital, Non-Discrimination.